

# PENGARUH INVESTASI, UPAH MINIMUM DAN IPM TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Reni Helvira<sup>1\*</sup>, Endah Putria Rizki<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak, Indonesia

---

## ABSTRACT

**Introduction:** This study aims to determine : 1) the effect of Investment on Unemployment Rate in West Kalimantan, 2) the effect of the Minimum Wages on the Unemployment Rate in West Kalimantan and 3) the effect of the Human Development Index (HDI) Rate in West Kalimantan. **Background Problems:** Unemployment is a problem faced by all countries in the world, especially in developing countries, one of which is Indonesia. Unemployment is a complex problem that is influenced by various interrelated factors, including the lack of available jobs, education and ability in their expertise. The unemployment rate in West Kalimantan is still quite high, which is ranked nineteen out of thirty-four Provinces. **Research Methods:** Descriptive and associative methods with a quantitative approach by using the econometrics model are used in this study to find out the effect of independent variables on the dependent variable. The analytical method in this study uses panel data regression analysis that uses cross section data, that is representing fourteen districts/cities in West Kalimantan and time series data from 2008 to 2017. **Results:** this study indicate that the variables of economic growth, minimum wages and the index of human development index simultaneously (together) significantly influence the level of open unemployment in West Kalimantan. Then, partially (individually) the investments variable has a positive and not significant effect on the level of open unemployment in West Kalimantan, the minimum wage has a positive and significant effect on the level of open unemployment in West Kalimantan and the human development index has a negative and not significant effect on the level of open unemployment in West Kalimantan. **Conclusion:** The minimum wage is a factor affecting unemployment in West Kalimantan compared to other variables such as investment and HDI.

---

## ARTICLE INFO

---

### Article History:

Received September 8<sup>th</sup>

July 2020

Received in revised from

September 8<sup>th</sup> 2020

Accepted ... July 2020

### Keywords:

Investment, Minimum  
Wages, Human  
Development Index (HDI)  
and Open Unemployment  
Rate

---

\* Corresponding Author ; E-mail address: reni.helvira@gmail.com

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Banyaknya jumlah penduduk ini jika tidak bisa diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan lapangan pekerjaan, maka akan menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial seperti pengangguran (Rubijanto, 2012). Masalah pengangguran merupakan masalah yang kompleks terutama bagi negara-negara berkembang, sehingga tidak bisa dihilangkan namun bisa diminimalisir.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sukirno, 2013). Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sedangkan menurut Rubijanto (2012) pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam distribusi pendapatan yang kurang menguntungkan penduduk yang berpendapatan rendah. Keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang telah tercipta tidak sanggup menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada pertambahan jumlah penduduk. Oleh karena itu, masalah pengangguran yang mereka hadapi dari tahun ke tahun semakin serius.

Pengangguran pada umumnya di sebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada dan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kesmiskinan dan masalah masalah sosial lainnya (Naf'an, 2014). Indikator yang biasa digunakan untuk menghitung pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tujuan pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang tersedia oleh pemerintah daerah dan masyarakat serta kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja baru dan perkembangan ekonomi suatu wilayah. Meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian secara merata bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan ekonomi.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pitono keadaan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan persentase sebesar 5,5%, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 5,61%. Dilihat dari jumlah pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 10.000 orang menjadi 7,04 juta orang pada tahun 2017, dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 7,03 juta orang. Penurunan ini disebabkan terjadinya peningkatan persentase penduduk yang bekerja pada sektor industri, perdagangan dan jasa kemasyarakatan. Faktor pemicu tingginya tingkat pengangguran akan menimbulkan dampak negatif adalah tindakan kriminal disuatu wilayah masalah ini merupakan masalah sosial (Rubijanto, 2012).

Masalah pengangguran juga berhubungan dengan investasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran ialah dengan mendorong tingkat investasi baik dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Seperti mendorong tumbuhnya bisnis atau pendirian pabrik, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk produksi atau permesinan dan menciptakan lapangan pekerjaan (Lusiana, 2012). Kegiatan penanaman modal ini akan banyak membutuhkan input produksi diantaranya tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi meningkat sehingga dapat mengurangi pengangguran (Zulhanafi,dkk, 2013).

Menurut Sukirno (2011) investasi merupakan penanam-penanam modal, pengeluaran dan perusahaan untuk membeli perlengkapan-perlengkapan produksi barang-barang dan jasa-jasa

yang tersedia dalam perekonomian. Ilhamdi,dkk (2015) menjelaskan bahwa investasi merupakan pembelanjaan penanaman modal seperti perlengkapan-perengkapan produksi untuk meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa. Kenaikan investasi akan berdampak pada peningkatan output jika nilai investasi lebih dari depresiasinya. Kenaikan output akan meningkatkan beberapa input produksi salah satunya adalah permintaan tenaga kerja.

Menurut teori Harrod Domar dalam Stefanus (2017), dalam teorinya investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya dengan semakin besar kapasitas produksi maka akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi full employment.hal ini karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, salah satunya faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat.

Pada dasarnya hampir semua investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya, investasi dibidang pendidikan dan SDA, dibidang kesehatan dan dibidang infrastrktur (jalan, pelabuhan, jembatan, pasar dll) (Noor dalam Stefanus, 2017).

Menurut Lusiana (2012) dikelurkannya undang-undang penanaman modal khususnya peningkatan investasi dan lapangan pekerjaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pasal 3 ayat (2) telah ditentukan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, yaitu: (1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (2) Menciptakan lapangan pekerjaan; (3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (7) Mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri; (8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain nilai dari faktor investasi disuatu daerah, tingkat upah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah minimum merupakan tingkat upah minimal yang harus dibayarkan oleh pengguna tenaga kerja, kepada pekerjanya. Upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup minimum (Henry Faizal Noor,2011). Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya sebagai pelindung kepentingan masyarakat khususnya para pekerja.

Menurut Ilhamdi,dkk (2015) permintaan tenaga kerja merupakan hubungan antara tingkat upah dan jumlah pekerja yang dipekerjakan perusahaan pada jangka waktu tertentu. Jika dalam perekonomian terjadi peningkatan penawaran tenaga kerja maka akan terjadi penurunan tingkat upah, maka jumlah permintaan tenaga kerja akan meningkat. Apabila angkatan kerja atau dengan tingkat pengangguran yang tinggi maka akan menyebabkan tingkat upah tinggi.

Upah yang berlaku disuatu wilayah bisa memberikan dampak positif dan negatif. Menurut Gilarso (2002) dampak positif dari penetapan upah dilihat dari penawaran tenaga kerja dimana kenaikan upah akan menyebabkan penawaran tenaga kerja meningkat dan jumlah pengangguran akan menurun. Sedangkan dampak negatif dari penetapan upah adalah saat upah buruh naik maka akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja karena perusahaan akan mengurangi jumlah pekerja sehingga jumlah pengangguran akan meningkat.

Sementara itu pembangunan suatu daerah juga dapat dilihat dari besaran nilai indeks pembangunan manusia. Tinggi rendahnya nilai IPM juga menentukan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Menurut Nur Feriyanto (2014) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia yang berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi mendasar yaitu kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Ketiga dimensi tersebut

memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan capaian umur panjang dan sehat. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan untuk daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Adapun hubungan indeks pembangunan manusia dengan tingkat pengangguran yaitu pembangunan sumber daya manusia merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Menurut Todaro dalam (Dwi Mahroji, 2019) pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar terciptanya kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya nilai IPM suatu daerah akan berdampak pada rendahnya jumlah pengangguran.

Menurut Todaro dalam (Dwi Mahroji, 2019) teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (human capital) dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Melalui investasi pendidikan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan diperlihatkan dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Semakin tinggi kualitas manusia, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong produktivitas kerjanya. Sehingga perusahaan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi, sehingga dengan penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak akan mengurangi tingkat pengangguran.

Menurut Todaro dalam (Dwi Mahroji, 2019) pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri, pembangunan manusia kunci dalam membentuk kemampuan sebuah Negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitasnya agar terciptanya pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang diukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran disuatu wilayah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dengan pengambilan judul “Pengaruh Investasi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kalimantan Barat Tahun 2008-2017”.

## METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan cross section. Menurut Mulyono (2000) time series adalah nilai variabel yang disusun dengan runtun waktu, dengan periode pengumpulannya dapat harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Dalam penelitian ini menggunakan time series selama 10 tahun terakhir yang diwakili data 2008-2017. Sedangkan Cross Section merupakan nilai variabel yang dikumpulkan pada waktu yang sama dari beberapa daerah, perusahaan atau perorangan. Data cross section yang di ambil sebanyak 14 kabupaten mewakili Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Menurut Basuki (2016), menyatakan bahwa “regresi data panel merupakan teknik regresi yang menggabungkan data runtun waktu (time series) dengan data silang (cross section). Regresi menggunakan data panel disebut juga dengan model regresi data panel”. Dalam penelitian ini estimasi model seperti berikut:

$$TPT_{it} = Investasi_{it} + UMK_{it} + IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka dalam persentase

Investasi = Jumlah investasi provinsi Kalimantan Barat dalam jutaan rupiah

UMK = Pertumbuhan upah minimum provinsi Kalimantan Barat dalam persen  
 IPM = Indeks Pembangunan Manusia dalam persen  
 $\varepsilon_{it}$  = variabel error

Lokasi yang peneliti gunakan untuk melakukan penelitian ini yaitu di kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat (Disnakertrans), jurnal, buku, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian kemudian di analisis dengan prosedur statistik. Data yang diteliti meliputi data pertumbuhan ekonomi, upah minimum, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran.

## PEMBAHASAN

### a Uji Pemilihan Model

Pemilihan model dilakukan untuk mengetahui model yang sesuai untuk metode regresi dalam mengestimasi data panel, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model atau Random Effect Model.

Tabel 1. Output Pemilihan Model dengan Uji Chow

Effects Test	Statistik	d.f	Prob
Cross-section F	3.827364	(13.123)	0.0000
Cross-section Chi-square	47.557203	13	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 10, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.1, diperoleh nilai probabilitas Chisquare =  $0,0 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya model regresi data panel yang sesuai adalah metode Fixed Effect. Oleh karena itu, harus dilakukan uji lanjutan untuk menentukan metode yang paling tepat digunakan, antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect, yaitu dengan melakukan Uji Hausman.

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan model Fixed Effect atau dengan model Random Effect.

Tabel 2. Output Pemilihan Model dengan Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq.Statistik	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	49.755735	3	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10, Tahun 2019

Berdasarkan Tabel 4.2, hasil Uji Hausman menunjukkan bahwa Chi-square statistik  $< \text{Chi-square tabel dengan } df = 3 \text{ yaitu, } 49.755735 > 7,81$ , maka  $H_0$  diterima, serta P-value signifikan, yaitu  $0.00 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak. Artinya metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect.

### b Uji Persyaratan Model

Uji ini digunakan dalam pengujian stasioneritas dari data, yaitu dengan melihat apakah terdapat unit root didalam model atau tidak. Untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak dengan cara membandingkan nilai statistik ADF dengan tabel ADF. Kriteria pengujian unit root juga dapat dilihat pada nilai probabilitas, jika  $\text{prob} > 0,05$  maka data tidak stasioner, dan jika nilai  $\text{prob} < 0,05$  maka data dikatakan stasioner.

Tabel 3. Hasil Uji Stasioner dengan Unit Root pada 2nd Difference

Variabel	Nilai Probabilitas			Keterangan
	Levin, Lin & Chu t	ADF Fisher Chi- square	PP	
			Fisher Chi- square	
INVESTASI	0.0000	0.0000	0.0000	Data Stasioner
UMK	0.0000	0.0000	0.0000	Data Stasioner
IPM	0.0000	0.0000	0.0000	Data Stasioner
TPT	0.0000	0.0000	0.0113	Data Stasioner

Sumber: Data diolah menggunakan Eviews 10

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil dari uji stasioner yang menggunakan 2nd difference langkah ketiga bahwa variabel investasi, upah minimum, indeks pembangunan manusia menunjukkan data stasioner. Artinya data sudah memenuhi kriteria pengujian unit root dengan melihat nilai probabilitasnya  $< 0,05$ .

#### c Uji Signifikansi

Hasil dari output yang digunakan adalah besaran koefisien deerminasi ( $R^2$ ). Nilai  $R^2$  berkisar antara 0 (nol) dan 1. Nilai  $R^2$  yang terkecil berarti kemampuan variabel-variabel besarnya dalam menjelaskan variasi varabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel besarnya memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variasi variabel bebas.

Berdasarkan Tabel 4.4 diperoleh nilai R-squared sebesar 0,4960 persen, artinya 49,60 persen variasi perubahan tingkat pengangguran terbuka dapat dijelaskan oleh hubungan antara Investasi, Upah Minimum Kota, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan sisanya 50,40 persen artinya di pengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti.

Tabel 4. Output Uji Signifikansi Untuk Uji Ketetapan Model, Uji F dan Uji T

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2010.405	1.680542	1196.284	0.0000
INVESTASI?	0.142401	0.186494	0.763573	0.4466
UMK?	1.33E-06	1.27E-06	10.41979	0.0000
IPM?	-0.106146	0.210767	-0.503618	0.6154

#### Effects Specification

R-squared	0.496026	Mean dependent var	2012.500
Adjusted R-squared	0.430468	S.D dependen var	2.882595
S.E of regression	2.175417	Sum squared resid	582.0900
F-statistic	7.566263	Durbin-Waston stat	0.304999
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah menggunakan eviews 10

Pada Tabel 4.4, diperoleh nilai Probabilitas = 0.00  $< 0,05$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Investasi, Upah Minimum Kab/Kota, dan IPM secara simultan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara pada pengujian secara parsial atau dikenal dengan Uji t, Variabel investasi tidak berpengaruh signifikan dilihat dari nilai Prob sebesar 0.44  $> 0.05$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individu antara investasi terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat. Sementara variabel indeks pembangunan manusia tidak

berpengaruh signifikan dilihat dari nilai Prob sebesar  $0.61 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individu antara indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Barat. Sedangkan variabel upah minimum berpengaruh signifikan dilihat dari nilai Prob  $0.00 > 0.05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara individu antara upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat.

Berdasarkan hasil estimasi model, dapat dilihat nilai intersep dari masing-masing daerah. Pada Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa masing-masing Kabupaten/Kota memiliki tingkat koefisien Fixed Effect Model yang berbeda-beda. Jika variabel Investasi, Upah Minimum dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sama dengan 0 (nol), maka pengaruh tingkat pengangguran terbuka yang ada di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat mengalami kenaikan dan penurunan. Peningkatan tertinggi terjadi di Kota Pontianak dan Kota Singkawang dengan nilai sebesar 1.14 persen dan 1.76 persen, hal ini dikarenakan sebagai daerah perkotaan tidak bisa menghindari arus urbanisasi (migrasi), sehingga perkembangan jumlah penduduk yang pesat di perkotaan tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, akibatnya pengangguran meningkat. Kabupaten Bengkayang juga mengalami peningkatan yaitu sebesar 0.35 persen, hal ini karena Kabupaten tersebut tidak memiliki daerah yang luas sehingga lapangan pekerjaan tersedia sangat minim.

Tabel 5. Nilai Intersep Setiap Individu Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten / Kota	Nilai
Kab. Sambas	-1.468982
Kab. Bengkayang	0.355463
Kab. Landak	-0.804766
Kab. Pontianak	-0.430219
Kab. Sanggau	-3.595346
Kab. Ketapang	-3.510182
Kab. Sintang	-1.480476
Kab. Kapuas Hulu	-2.291715
Kab. Sekadau	-1.501087
Kab. Melawi	-2.229589
Kab. Kayong Utara	-2.239331
Kab. Kubu Raya	-0.199636
Kota Pontianak	1.141527
Kota Singkawang	1.766831

Sumber: Data diolah menggunakan dengan Eviews 10

Sedangkan penurunan pada Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar -2.23 persen, hal ini dikarenakan pemerintah desa memanfaatkan potensi yang ada di desa yakni pertanian, kehutanan, dan perikanan sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pada Kabupaten Pontianak juga mengalami penurunan sebesar -0.43 persen hal ini cukup berimbang antara sektor industri, jasa sosial dan PHR, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Pada Kabupaten Sambas, Ketapang, Sekadau, Sanggau, Landak, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu juga mengalami penurunan jumlah pengangguran yaitu masing-masing sebesar -1.46, -3.51, -1.50, -3.59, -0.80, -1.48, -2.22 dan -2.29 persen, hal ini dikarenakan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menjadi kontribusi tertinggi, sehingga dapat mengurangi pengangguran. Sedangkan Kubu Raya juga mengalami penurunan sebesar 0.19 persen, hal ini dilihat dari sektor terbesar yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Kabupaten Kubu Raya yakni bangunan.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kalimantan Barat, artinya apabila jumlah investasi meningkat maka tidak akan berdampak langsung dan signifikan terhadap penurunan jumlah pengangguran terbuka di Kalimantan Barat. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis dimana investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran.

Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi karena dengan pembentukan modal dalam membentuk kapasitas produksi maupun menciptakan lapangan baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya pembentukan lapangan kerja baru secara tidak langsung investasi mengurangi jumlah pengangguran (Todaro, 2000).

Pengaruh yang tidak signifikan pada investasi terhadap pengangguran disebabkan oleh kesenjangan yang relatif besar realisasasi investasi di Kalimantan Barat yang masuk pada sektor-sektor padat modal hal ini akan berdampak negatif pada kesempatan kerja. Dikarenakan sistem padat modal mengandalkan kemajuan teknologi canggih seperti permesinan dan komputer seperti di perusahaan-perusahaan industri yang ada di Kalimantan Barat. Dimana perekonomian di Kalimantan Barat masih ditopang oleh tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Jika dilihat dari ketiga sektor maka yang paling utama pada sektor primer pada sektor perkebunan. Salah satunya industri pengolahan perkebunan di beberapa daerah dimana industri ini merupakan salah satu yang paling unggul dan canggih dan memiliki keuntungan yang sangat besar sehingga mengundang para investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini akan berdampak pada permintaan tenaga kerja yang berkurang dan menambah jumlah pengangguran yang ada, hal ini dikarenakan rendahnya pendidikan, pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja sehingga memiliki persyaratan yang khusus untuk mendapatkan kesempatan kerja.

## **KESIMPULAN**

Investasi, upah minimum, dan indeks pembangunan manusia secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di empat belas Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dilihat dari nilai probabilitas (0,0000).

Investasi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya ketika investasi tinggi maka jumlah pengangguran juga tinggi, hal ini dikarenakan di beberapa daerah Kalimantan Barat para investor tertarik pada sektor padat modal untuk menanamkan modal pada industri-industri yang memiliki keuntungan yang besar sehingga adanya penyerapan tenaga kerja harus memenuhi persyaratan khusus pada kesempatan kerja.

Upah minimum secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya jika tingkat upah tinggi maka jumlah pengangguran juga tinggi, hal ini terjadi karena tingginya tingkat upah tidak selalu berdampak positif pada permintaan tenaga kerja karena tidak semua perusahaan mampu membayar sesuai tingkat upah tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Artinya ketika IPM naik maka akan menurunkan jumlah pengangguran, hal ini dikarenakan kualitas SDM sangat diperlukan dalam dunia kerja.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdussalam. 2009. Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Restu Agung

Agus Widarjono. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Edisi Ketiga. Yogyakarta: EKONISIA.

- Anita Purnama Sari. 2018. Pengaruh Kemiskinan, Tenaga Kerja, Jumlah Penduduk dan Distribusi Pendapatan Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kota Pontianak. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. IAIN Pontianak.
- Anto Hendri. 2003. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. Yogyakarta: Ekonisia.
- Aprilliawan, Dody dkk. 2013. Pemodelan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi Data Panel. Jurnal Gaussian. Volume 2, Nomor 4. Hal 301-321
- Ari Zuliadi. 2016. Analisis Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Aceh Barat. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.
- Arif Rahman Hakim. 2015. Pengantar Time Series: Stasioneritas, Akar Unit, dan Kointegrasi. Depok (tidak dipublikasikan).
- Baqir, Sharief. 2007. Keringat Buruh, Hak dan Pekerja Dalam Islam. Jakarta. Al-Huda.
- Basuki, dkk. 2016. Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis : Aplikasi SPSS&EViews. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- BPS Prov. Kalbar. 2013-2017. Kalimantan Barat Dalam Angka. Pontianak: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.
- Case and Fair. 2006. Prinsip-prinsip Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Dedi Rosadi. 2012. Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews. Yogyakarta: ANDI
- Deka Ratna Sari. 2016. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Perspektif Ekonomi Islam Provinsi Kalimantan Barat. Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pontianak.
- Disnakertrans Prov. 2013-2017. Kalimantan Barat Dalam Penetapan Upah Minimum Kab/Kota/Prov. Pontianak: Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
- Dwi Mahroji dan Ina Nurkhasanah. 2019. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Banten. Jurnal Ilmu Ekonomi. Vol.9, No.1 p-ISSN: 208-4473.
- Gilarso, T. 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kasanius
- Gujarati, Damondar N. 2007. Dasar-dasar Ekonometrika. Jilid 2. Jakarta: Terjemahan Dr. Gunawan.
- Hanafi, Abdul Halim. 2011. Metode Penelitian Bahasa. Diadit Media Press. Jakarta
- Henry Faizal Noor. 2011. Ekonomi Manajerial: Edisi Revisi. Jakarta. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ilhamdi, dkk. 2015. Pengaruh Foreign Direct Investment Dan AFTA Terhadap Kesempatan Kerja Sektorial Di ASEAN 5. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol.4, No.2
- Irsad Lubis, dkk. 2008. Pembangunan Manusia di Indonesia dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya. Vol 4 No.1 hal 17-23.
- Karim, Adimarwan. A. 2007. Ekonomi Makro Islam. Jakarta. PT. RAJAGRAFINDO
- Kusnendi. 2015. Ekonomi Sumber Daya dan Alam. Jakarta. Universitas Terbuka.

- Lusiana. 2012. Usaha Penanaman Modan di Indonesia. Jakarta. PT.RajaGrafindo Persada.
- Mudjarat, Kuncoro. 2001. Metode Kuantitatif. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN
- Mudjarat, Kuncoro. 2010. Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan. Yogyakarta: Erlangga.
- Mudjarat, Kuncoro. 2018. Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mulyono, Anton M. 2000. Kamus Besar Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta
- Naf'an. 2014. Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah. PT. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nina Cahyani. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional, Inflasi dan Ivestasi Terhadap Jumlah Pengangguran di DIY Tahun 1986-2015. Skripsi. FKIP Universitas Sanata Dharma.
- Nur Feriyanto. 2014. Ekonomi Sumber Daya Manusia. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Putri Rahayu Ningsih. 2014. Pengaruh Upah Minimum Kota Terhadap Kinerja Karyawan di PT Mekar Argajasa Manunggal Cabang Pontianak. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pontianak.
- Qadharawi, Yusuf. 2005. Sepektrum Zakat Dalam Membangun Dalam Ekonomi Kerakyatan. Jakarta: Zikrul Halim.
- Rubijanto, S. 2012. Intelijen Ekonomi Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia.
- Silalahi, Dodi dkk. 2014. Analisis Ketahanan Pangan Provinsi Sumatra Utara Dengan Metode Regresi Data Panel. Saintia Matematika, Vol 2, nomor 3, pp.237-251
- Simanjuntak, Payaman J. 2012. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: LPFE-UI.
- Shihab, M Quraish. 2002. Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 14. Jakarta: Gema Isnani Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Al-fabeta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sukirno, Sadono. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: PT Gaja Grafindo.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makro Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukirno, Sadono. 2012. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2013. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumanto. 2014. Statistika Terapan. Yyakarta: CAPS.
- Supranto, J. 2004. Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi. Rineka Cipta, Jakarta
- Syaid Yusuf. 2015. Pengaruh IPM, PDRB Perkapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Kemiskinan. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam .Pontianak.
- Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Zulhanafi, dkk. 2013. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas dan Tingkat Pengangguran di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi. Vol.II.No.33 pp 85-109.